

Suluh Media

Editor
Dr Noverman Duadji
Unang Mul Khan, MBA., Ph.D.

Anak, Perempuan, dan Sustainable Development Goals (SDGs)



Anak, Perempuan, dan Sustainable Development Goals (SDGs)

Dr. Noverman Duadji
Unang Mulkhan, MBA., Ph.D.
Dr. Novita Tresiana

Suluh Media

ANAK, PEREMPUAN, DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

Editors: Dr. Noverman Duadji; Unang Mulkhan, MBA., Ph.D.; Dr. Novita Tresiana

Hak Cipta © 2017 pada penulis

Suluh Media

Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283

Telp: 0274-889398; 0274-882262; Fax: 0274-889057;

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Tajuk Entri Utama: Duadji, Noverman

ANAK, PEREMPUAN, DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)/Noverman
Duadji; Unang Mulkhan; Novita Tresiana

Edisi Pertama. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Suluh Media, 2017
x + 108 hlm.; 25 cm

Bibliografi.:

ISBN : 978-602-8610-43-8

E-ISBN : 978-602-8610-44-5

- I. Pembangunan
- I. Mulkhan, Unang
- II. Tresiana, Novita

III. Judul

362

Semua informasi tentang buku ini, silahkan scan QR Code di cover belakang buku ini

PENGANTAR

Ketua Puslitbang Wanita, Anak dan Pembangunan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung

Sudah lebih dari 20 tahun isu gender di Indonesia termasuk perempuan dan anak dalam pembangunan diwacanakan, didiskusikan, dan implementasikan oleh berbagai kalangan, mulai dari akademisi, aktifis, pengambil kebijakan, bahkan masyarakat tingkat lokal, regional, dan nasional. Terlebih, komitmen global terkait isu gender, perempuan dan anak sudah ada dalam *Millennium Development Goals* (MDGs), yang telah berakhir pada September 2015, dan dilanjutkan dengan agenda Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Persoalan khusus perempuan akibat diskriminasi berbasis gender di tingkat internasional pun telah menghadirkan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), yang diterjemahkan menjadi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Konvensi tersebut telah disahkan oleh PBB pada tahun 1979, dan diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU No 7 tahun 1984. CEDAW menetapkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, dan menekankan tiga prinsip penting, yakni (a) Prinsip kesetaraan/persamaan substantif ; (b) prinsip non - diskriminasi dan (c) Prinsip kewajiban negara. Sementara itu, terkait kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 1993, PBB mengadopsi Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.

Sementara itu, berbagai perlakuan buruk yang menghambat tumbuh kembang anak secara optimal telah menghadirkan Konvensi Hak Anak, yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1989, Ada 4 prinsip dasar hak anak yang

terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, yaitu (a) Prinsip non-diskriminasi - tidak ada pembenaran terhadap diskriminasi atas alasan apapun; (b) Prinsip kepentingan terbaik anak; (c) Hak atas untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta (d) Penghargaan terhadap pendapat anak. Di tingkat nasional telah diperjuangkan berbagai Undang-Undang untuk melindungi anak dan perempuan, antara lain UU tentang Perlindungan Anak (no 23 tahun 2002) dan UU perubahannya (UU no 35 tahun 2014); UU tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumahtangga (No 23 Tahun 2008); UU tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (no 21 tahun 2007), UU tentang Anti Pornografi (no 44 tahun 2008), serta UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (no 11 thn 2012).

Meski demikian, berbagai persoalan diskriminasi atau perlakuan buruk dan kekerasan terus terjadi pada perempuan dan anak. Persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak kunjung berakhir, sebab justru muncul dalam bentuk yang sangat bervariasi dan kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa strategi MDGs masih meninggalkan persoalan yang harus diakomodasi dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Struktur Kerangka dasar dalam MDGs pada mulanya tidak mengandung *Sexual and Reproductive Health and Rights* (SRHR), tetapi sejalan dengan implementasi kemudian dimasukkan akses universal atas SRHR sebagai bagian dari ukuran pembangunan sejak tahun 2000, yaitu dengan memasukkan angka kematian ibu melahirkan.

Catatan dan monitor *Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women* (ARROW) dalam ICPD+15 monitoring mengungkapkan bahwa Indonesia termasuk dalam 12 negara Asia yang belum menunjukkan kemajuan signifikan perihal indeks SRHR. Rasio kematian ibu melahirkan di Indonesia tahun 2005 masih tinggi sampai dengan sekarang dan secara keseluruhan Tenggara dan Asia umumnya, yaitu rata-rata 420 (Arrow Report, <http://www.arrow.org.my/?p=about-indonesia>).

Dengan penduduk kurang lebih 228.5 juta, pertumbuhan penduduk 1.36% per tahun dan kepadatan penduduk 123 orang/km, di Indonesia masih tercatat tingkat aborsi yang cukup tinggi, yaitu 15% dari jumlah ibu (89% di kalangan perempuan menikah dan 11% di kalangan perempuan tidak menikah). Permasalahan tersebut disebabkan oleh akses hak dan pendidikan yang tidak didapatkan dengan cukup baik. Di samping kematian ibu melahirkan

melahirkan dan aborsi, terdapat pula kasus infeksi HIV/AIDS karena buruknya akses atas SRHR. Indeks SRHR di Indonesia menunjukkan rata-rata rendah dari 0.116 pada tahun 2007 sampai dengan sekarang.

Perubahan iklim kemudian juga memperparah kondisi akses dan hak SRHR dengan adanya banjir di musim penghujan, kelangkaan air di musim kemarau, kelangkaan pangan, tingginya prevalensi kanker yang tinggi karena pola konsumsi makanan berubah, dan resiko bencana alam yang selalu mengintai seiring dengan buruknya konservasi lingkungan. Hal esensial lainnya yang muncul ada beberapa bulan terakhir ini adalah maraknya kekerasan seksual yang disertai dengan pembunuhan pada korban. Selain kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak, persoalan trafficking, perbudakan manusia, dan narkoba juga semakin marak, tersistem, sulit dilacak, dan memberikan dampak berantai yang merusak kehidupan masyarakat secara umum.

Persoalan peningkatan kapasitas politik perempuan juga masih memiliki persoalan yang cukup besar. Rendahnya keterwakilan perempuan dalam bidang-bidang keputusan, baik di lembaga eksekutif, yudikatif terutama lembaga legislatif yang juga perlu adanya peningkatan, baik secara kuantitas maupun kualitas, khususnya dalam menghadapi pemilu 2019 yang akan datang.

Melihat kompleksitas persoalan di atas dan arus agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Pusat Penelitian dan Pengembangan Wanita, Anak dan Pembangunan, memandang perlu adanya kolaborasi dari beberapa penulis baik akademisi maupun pegiat isu gender, perempuan dan anak untuk terlibat dalam memberikan informasi dan pengetahuan tentang isu perlindungan wanita dan anak, sekaligus menemukan roadmap penelitian dan pengembangan yang diarahkan pada penyelesaian persoalan gender, wanita dan anak di atas.

Bandar Lampung, Oktober 2017

Dr Novita Tresiana
Ketua Pusat Studi Wanita, Anak dan Pembangunan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Lampung

BAB I

EDITORS: ANAK, PEREMPUAN, DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

DAFTAR ISI

PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
Bagian 1	
Anak, Perempuan, dan EDITORS: Sustainable Development Goals (SDGs)	
<i>Noverman Duadji dan Unang Mul Khan</i>	1
Bagian 2	
Pemetaan Kondisi dan Model Ketahanan (Resilience) untuk Anak di Daerah Rawan Bencana	
<i>Diah Utami Ningsih dan Budi Kadaryanto</i>	5
Bagian 3	
Budaya Damai Tanpa Kekerasan Melalui berbagai Media dalam Kesetaraan Gender	
<i>Yuli Nugrahani, S.T.P.</i>	29
Bagian 4	
Menyusui Sebagai Implementasi dari Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)	
<i>Ritma Fathi Khalida, S.Si.</i>	41
Bagian 5	
Harapan dan Kenyataan Tentang Jaminan Fasilitas Khusus Pekerja Perempuan	
<i>Rinda Gusvita, S.T.P., M.Sc.</i>	55

Bagian 6

Taman Baca Masyarakat (TBM) Kampung Merdeka

Galih Aditya & Virdyas Eka D

66

Bagian 7

Tantangan dan Upaya Mengurangi Rokok

Eni Muslihah

77

Bagian 8

Forum Warga, Kesetaraan Gender dan Partisipasi KB Vasektomi Pria

Noverman Duadji dan Novita Tresiana

87

Bagian 9

Penutup: Tantangan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Era SDGs

Noverman Duadji dan Unang Mul Khan

105

-0000-

BAGIAN 8

FORUM WARGA, KESETARAAN GENDER DAN PARTISIPASI KB VASEKTOMI PRIA

Noverman Duadji dan Novita Tresiana

Staf Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fisip Unila Tim Peneliti Puslitbang
Wanita, Anak dan Pembangunan LPPM Unila

Fenomena kegagalan pemerintah dalam konteks pembangunan kependudukan, khususnya keluarga berencana adalah suatu kondisi dimana pemerintah tidak memiliki kapasitas *governability*, yang ditandai dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, baik pria maupun wanita dalam program keluarga berencana. Penelitian yang dilakukan Tresiana dan Duadji (2015) mendapati beberapa bukti kegagalan disebabkan model partisipasi masyarakat dalam KB yang menekankan model politis dan administratif, belum mempersiapkan kerangka dan mekanisme bagaimana partisipasi berlangsung, dan belum mengembangkan model alternatif pemberdayaan masyarakat. Mulyawan (2012) mempertegas pendapat di atas dengan menggambarkan belum optimalnya penyelenggaraan *civic governance*, yang esensinya merupakan model pembangunan partisipatif, yang memerlukan pengelolaan pembangunan, termasuk KB berbasis partisipasi masyarakat. Fiisabiilillah, Vidayani dan Hudalah (2014) melalui penelitian melengkapi argumen di atas, dengan mengedepankan pentingnya pengelolaan modal sosial (nilai-nilai lokal) sebagai daya ungkit partisipasi pada setiap sektor pembangunan di desa.

Khusus pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, penelitian yang dilakukan oleh Tresiana dan Duadji (2015) di Kabupaten Lampung Selatan sebagai lokasi terpilih, mendapati kegagalan pemerintah dalam program-program pembangunan, termasuk partisipasi KB aktif, khususnya bagi pria,

konteks pembangunan kependudukan dan KB. Forum ini menjadi transaksi pengetahuan, sehingga muncul peningkatan kesadaran bersama sama, merumuskan masalah bersama, mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh komunitas.

Untuk ketercapaian hal di atas, maka dibangun instrumen-instrumen berupa: 1) perlunya peran dan kehadiran tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat, menjadi modal utama dalam pembentukan forum dan proses berjalannya forum; 2) Perlunya dukungan peraturan desa yang mengadvokasi eksistensi forum warga sebagai media dialog dan partisipasi publik yang diakui keberadaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Denhardt, Janet dan Denhardt, Robert. (2013). *Pelayanan Publik Baru : Dari Manajemen Steering Ke Servicing*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Fiisabilillah, Vidayani dan Hudalah.(2014). *Peran Modal Sosial Dalam Kerjasama Antar Daerah Kartamantul*. *Mimbar, Jurnal Sosial dan Pembangunan* Vol. 30 Nomor 2, Desember, pp.209-219
- Friedmann, John. 1987. *Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action*. New Jersey, Princeton University Press
- Gaventa, J. &Valderama, C. 2001. *Participation, Citizenship and Local Government: Background note prepared for workshop on Strengthening participation in local governance*. Institute of Development Studies.
- Healey, Patsy. 1997. *Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies*. Macmillan Press LTD, London.
- Mulyawan,Rahman.2012. *Penguatan Civic Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan*. *Mimbar, Jurnal Sosial dan Pembangunan* Vol. 28 Nomor 2, Desember, pp.157-162
- Tresiana dan Duadji.2015. *Laporan Akhir Penelitian Model Peningkatan Partisipasi KB Vasektomi di Kabupaten Lampung Selatan (Mandiri)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lampung. Tidak Dipublikasikan.

BKKBN 2014. *Laporan Peningkatan Partisipasi Pria dan Kesehatan Reproduksi*. Bandar Lampung. Tidak dipublikasikan.

* website : <http://www.bkkbn.go.id>. *Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan Kesehatan Reproduksi di Indonesia*. Diakses Tanggal 12 Juni 2016

-oo0oo-

SIMPULAN DAN REKOMENDASI